



Strategi Ketahanan Sosial-Ekonomi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Studi Pada Kelompok Paguyuban Budaya Bangsa Di Jawa Tengah

Ceprudin ^{a,1}, Mustolehudin ^{b,2}, Umi Masfiah ^{c,3}

^a Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

^b Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia, Indonesia

^c Peneliti Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Indonesia, Indonesia

¹ Ceprudin.cecep@gmail.com; ² mustolehudin@gmail.com; ³ masfiah.umi@gmail.com

*email korespondensi : ceprudin.cecep@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan
2024-02-08

Diterima
2024-05-17

Dipublikasikan
2024-07-05

Kata Kunci:

Strategi; Regenerasi; Penghayat
Kepercayaan; Paguyuban Budaya
Bangsa (PBB)

ABSTRAK

This research aims to reveal the survival strategies of the Faith Believers group (adherents of non-six religions in Indonesia) at the National Cultural Association (PBB). Presenting methods of resilience for the members of the Faith at this time is important as a guide to good practice (best practice) for fellow Believers. Examining group survival strategies Beliefs are closely linked to a history full of repression and discrimination. The National Cultural Association (PBB) is a group of believers who, according to organizational policy, choose not to join any religion. This type of research uses a juridical-empirical approach. This research was conducted in Kebumen Regency (central management) and Banjarnegara Regency (largest mass base) for PBB Faithful residents. Data sources were obtained from interviews with organizational leaders, young people and students who experienced pressure while being members of the PBB Faith. The author hypothesizes that PBB adherents are a group that firmly adheres to the teachings of their ancestors. Even though they face great pressure, they are still able to survive and carry out regeneration until now.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Kajian tentang kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa (penganut non enam agama negara –Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha– di Indonesia) dalam kemampuan mempertahankan regenerasi erat kaitannya dengan peristiwa berdarah tragedi politik tahun 1965-1966. Niels Mulder, dalam buku “kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa; kelangsungan dan perubahan kulturil” menggambarkan tragedi 1965-1966 yang berkaitan dengan eksistensi kelompok Penghayat Kepercayaan. Boleh dikata, tragedi berdarah tahun 1965 itu ibarat badai yang mengakibatkan porak porandanya kelompok-kelompok Kepercayaan di Indonesia.¹

Menurut Mulder upaya represi dan diskriminasi terhadap Kelompok Penghayat Kepercayaan mulai tampak pasca Pemilu tahun 1955 yang dimenangkan kelompok nasionalis. Tahun 1955, tulis Mulder, adalah tahun penting untuk menggambarkan pecahnya antara kelompok Islam dan kelompok sinkretisme kejawen –kelompok Kepercayaan. Pemilu pertama itu menunjukkan bahwa

¹ Niels Mulder and Alois A. Nugroho, *Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: kelangsungan dan perubahan kultural*, Cet.2 (Gramedia, 1984).

Indonesia (setidaknya dalam afiliasi politik) bukanlah (yang sepakat dengan) negara Islam.² Secara nasional partai-partai Islam (jika digabungkan) hanya memperoleh suara 42 persen. Sementara partai Nasionalis berhasil unggul meski selisih suaranya tidak terpaut signifikan.³

Sejak itu, nasib kelompok Kepercayaan semakin sulit dan terhimpit baik dalam penerimaan sosial, akses layanan publik, layanan administrasi, akses pendidikan, dan tentunya akses pekerjaan. Faktor paling menyulitkan warga Penghayat Kepercayaan adalah labeling PKI dan tidak dapat mengurus Adminduk berupa pencatatan perkawinan. Sejak tahun 1965 hingga terbit Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) warga Penghayat Kepercayaan yang tidak masuk di salah satu agama, mereka tidak dapat mencatatkan perkawinannya dan secara otomatis tidak mendapatkan akta nikah.

Kelompok Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa (selanjutnya ditulis PBB) adalah satu kelompok Kepercayaan yang anggotanya memilih tidak memeluk agama. Akibatnya yang menikah antara tahun 1965 hingga 2006 hanya bisa menikah secara adat dan tidak mendapatkan akta nikah. Pada tahun 2007 terbit Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Adminduk yang di dalamnya mengatur dan memfasilitasi pencatatan perkawinan Penghayat Kepercayaan. Pada tahun 2008 barulah warga PBB mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) secara bersama-sama.

Penelitian tentang Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia banyak dilakukan baik dalam bentuk jurnal maupun tugas akademik. Penelitian dengan tema hukum dan HAM di antaranya Megamendung Danang Pransef (2021) dengan fokus kajiannya pada pemenuhan Administrasi Kependudukan warga Penghayat Kepercayaan. Muwaffiq Jufri dengan fokus pada kajian argumentasi Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 penyetaraan status agama dan Kepercayaan di Indonesia.⁴ Jurnal Kristina Viri fokus mengkaji pemenuhan Adminduk warga Penghayat Kepercayaan.⁵

Penelitian dengan tema Sosial dan Agama dilakukan Atih Ardiansyah dengan fokus kajiannya pada konsep diri, harga diri, peran diri, identitas diri, dan ideal diri Penghayat Kepercayaan.⁶ Abd Hannan dengan fokus kajian pada eksistensi serta penjelasan sosiologis perihal makna hak sosial Penganut Kepercayaan di Indonesia.⁷ Kajian Suwardi Endraswara menelaah budi pekerti luhur warga Penghayat Kepercayaan dan sumbangsuhnya terhadap pendidikan karakter bangsa.⁸

² Mulder and Nugroho.

³ 'ANRI Luncurkan Naskah Sumber Arsip Pemilu 1955' <<https://anri.go.id/en/publications/news/anri-luncurkan-naskah-sumber-arsip-pemilu-1955>> [accessed 8 August 2024].

⁴ Muwaffiq Jufri, 'POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA', *Jurnal Yudisial*, 13.1 (2020), p. 21, doi:10.29123/jy.v13i1.360.

⁵ Kristina Viri and Zarida Febriany, 'Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2.2 (2020), pp. 97-112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119.

⁶ Atih Ardiansyah, 'KONSEP DIRI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA DI YAYASAN CENDEKIAWAN KAMPUNG INDONESIA', *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13.1 (2022), p. 36, doi:10.31506/jrk.v13i1.15314.

⁷ Abd Hannan, 'Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama', *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 13.1 (2022), pp. 1-26, doi:10.32923/maw.v13i1.2209.

⁸ Suwardi Endraswara, 'AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR DALAM SASTRA MISTIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER BANGSA', *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 1.2 (2019), p. 31, doi:10.26877/jisabda.v1i2.4742.

Penelitian yang secara spesifik menelaah eksistensi Penghayat Kepercayaan PBB skripsi Ira Ainurrohmah pada Fakultas Ushuludin UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.⁹ Penelitian dalam bentuk Jurnal Satria Adhitama. Puji Sulani, dkk¹⁰ dengan fokus kajian secara umum berkaitan dengan eksistensi Penghayat Kepercayaan PBB.

Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu di atas belum ada yang fokus mengkaji strategi bertahan (*resiliensi*) warga Penghayat Kepercayaan PBB dari tekanan sosial dan diskriminasi layanan publik. Mengkaji eksistensi dan resiliensi kelompok Kepercayaan Paguyuban Budaya menarik karena berdasarkan sejarahnya penuh dengan rintangan dan hambatan baik secara pelayanan publik maupun penerimaan sosial masyarakat. Eksistensi Penghayat Kepercayaan di Indonesia, baik setelah maupun sebelum kemerdekaan, banyak memberikan sumbangsih besar terhadap penguatan karakter bangsa.

Warga Kepercayaan PBB bukan kelompok yang menentang pemerintahan yang sah secara konstitusional. Bahkan warga Penghayat Kepercayaan dalam setiap ajarannya selalu menekankan pentingnya taat hukum dan taat membayar pajak. Mereka setia pada NKRI dan menjunjung tinggi serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Artikel yang mengkaji eksistensi kelompok Penghayat Kepercayaan telah banyak dilakukan dengan tema dan sudut pandang yang berbeda-beda. Meskipun dengan fokus kajian yang berbeda mayoritas sepakat bahwa ada fakta historis, sosiologis, dan yuridis yang membuat kelompok Kepercayaan PBB tidak terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Melewati masa-masa hambatan terberat itu warga Kepercayaan PBB harus mengganti nama organisasi, mengganti identitas agama, bahkan ada yang harus mengasingkan diri ke hutan supaya aman dari kejaran masa.

Penelitian ini berusaha mengkaji dari sudut pandang yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berusaha melengkapi penelitian terdahulu dengan fokus kajian pada resiliensi kelompok Kepercayaan PBB yang mampu bertahan dan keluar dari tekanan represi sosial ekonomi dan diskriminasi hebat selama puluhan tahun. Penulis mengajukan pertanyaan apa saja bentuk represi dan diskriminasi yang dialami kelompok Kepercayaan PBB dan bagaimana warga Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan (*resiliensi*) dan mampu beradaptasi dengan aturan-aturan hukum yang mendiskreditkannya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti berpartisipasi langsung dalam kegiatan pengumpulan data di lapangan, menganalisis secara reflektif semua dokumen yang ditemukan, dan laporan hasil penelitian disusun secara mendetail. Penelitian hukum dengan menggunakan data lapangan secara kualitatif lebih menekankan pada proses pengumpulan dan analisis data yang dapat dipercaya (*trustworthiness*), untuk memperoleh kesimpulan yang kredibel yang merefleksikan kedalaman dan kekayaan data.¹¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁹ Ira Ainurrohmah, 'Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Paguyuban Budaya Bangsa: Studi Analisa Terhadap Aliran Kepercayaan Di Kecamatan Langensari' (unpublished diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) <<https://digilib.uinsgd.ac.id/38126/>> [accessed 8 August 2024].

¹⁰ Puji Sulani, Priyanto Wibowo, and Tuty Nur Mutia Enoch Muas, 'Sustainability of Cultural Identity of Ex-Adherents Kawula Warga Naluri of 1966-1971 in Banjarnegara, Indonesia', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6.2 (2022), pp. 183-94, doi:10.15575/jw.v6i2.15727.

¹¹ Dr Sugiyono, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010.

3.1 Hakikat Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Term “kepercayaan” merupakan konsep religiositas tertua yang ada di Indonesia. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa keberadaan penganut Kepercayaan ada sejak sebelum Agama Hindu datang dari India. Kepercayaan melekat pada masyarakat Nusantara. Meskipun secara definisi berbeda-beda, namun yang dimaksud adalah sama bahwa Kepercayaan adalah sistem keyakinan asli Nusantara. Seiring dengan penataan pemerintahan melalui perundang-undangan, Kepercayaan didefinisikan dengan suatu sistem keyakinan di luar agama-agama yang dianggap sah oleh negara (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Kong Hu Chu).

Para sarjana ada yang menyebut Kepercayaan dengan agama asli, agama budaya, aliran kebatinan bahkan disebut juga aliran kerohanian. Rahmat Subagya menjelaskan bahwa kebatinan adalah suatu ilmu atas dasar ketuhanan absolut, yang mempelajari kenyataan dan mengenal hubungan langsung dengan Allah tanpa perantara. Sumantri Mertodipuro mendefinisikan Kepercayaan lebih kepada fungsinya. Ia menjelaskan Kepercayaan adalah cara keyakinan Indonesia mendapatkan kebahagiaan.¹²

H.M. Rasyidi menyebut kata batin (Aliran Kebatinan) diambil dari kata “batini” yang artinya bagian dalam. Kata “batini” dapat diartikan sebagai orang-orang yang mencari arti yang dalam dan tersembunyi dalam kitab suci. Mereka mengartikan kata-kata itu tidak menurut bunyi hurufnya tetapi menurut bunyi interpretasi sendiri. Ridin Sofwan menegaskan bahwa Aliran Kebatinan dalam perkembangannya disebut dengan “Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Menurut Ridin Kepercayaan adalah suatu sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang ada di Indonesia selain agama, aliran, faham, sekte atau madzhab dari agama tersebut, serta bukan kepercayaan adat.

Terlepas dari beragam definisi mengenai Penghayat Kepercayaan, sejatinya merujuk pada hakikat yang sama. Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah sistem keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia sejak sebelum ada agama-agama yang datang dari luar negeri. Dalam perkembangannya, Kepercayaan diartikan keyakinan diluar “agama resmi” negara. Definisi ini setelah adanya perundang-undangan yang mengatur tentang agama yang diakui dan tidak diakui. Penulis sendiri, memilih terma “Penghayat Kepercayaan” sesuai dengan kebahasaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jika memilih kata “Aliran Kepercayaan” maka identik dengan sebuah aliran dalam sebuah keagamaan yang besar (agama mayoritas)

3.2 *Theori Community Resilience*

Istilah resilience menurut Gunderson dan Holling adalah kapasitas yang dimiliki suatu sistem ketika mengalami gangguan dan mampu mempertahankan fungsi dan kontrolnya¹³. Ketahanan diukur dengan besarnya gangguan yang dapat ditoleransi sistem dan masih bertahan. Pimm (1984) juga menyebut, resilience sebagai bentuk kemampuan sistem untuk melawan gangguan dan mampu kembali kepada situasi keseimbangan setelah terjadi gangguan.¹⁴

Community resilience merupakan kemampuan berkelanjutan dari suatu komunitas untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna merespon, bertahan, dan pulih dari situasi yang merugikan seperti bencana, terorisme, dan regulasi yang diterbitkan. Untuk membangun

¹² Kiki Muhamad Hakiki, 'ALIRAN KEBATINAN DI INDONESIA', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 6.2 (2011), pp. 63–76, doi:10.24042/ajsla.v6i2.497.

¹³ Lance H. Gunderson, Craig Reece Allen, and C. S. Holling, *Foundations of Ecological Resilience* (Island Press, 2012).

¹⁴ Stuart L. Pimm, 'The Complexity and Stability of Ecosystems', *Nature*, 307.5949 (1984), pp. 321–26, doi:10.1038/307321a0.

ketahanan komunitas diperlukan enam modal utama sebagai upaya penguatan komunitas, yaitu: masyarakat, pemikiran sistemik, adaptasi, transformasi, keberlanjutan, dan keberanian.¹⁵

Pertama, anggota masyarakat adalah modal dasar untuk menguatkan komunitasnya karena merekalah yang akan menentukan masa depan koloninya. Kedua, pola berpikir sistemik menjadi landasan yang penting untuk memahami masalah yang kompleks terkait berbagai faktor, krisis, dan keberlangsungan komunitas. Ketiga, kemampuan beradaptasi, kekuatan dan potensi komunitas untuk memberikan respon pada gejala perubahan sosial yang terjadi baik politik, budaya, maupun keagamaan yang sifatnya selalu dinamis dan berkelanjutan.

Keempat, transformasi (*transformation*) setelah komunitas memiliki kemampuan beradaptasi dari tantangan yang besar dan dinamis maka diikuti dengan langkah transformasi untuk melakukan perubahan sosial keagamaan yang mendasar. Kelima, adanya prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dimana lingkup ketahanan masyarakat dapat tercapai tidak hanya bersifat in group an sich dan hanya mencakup pemenuhan kebutuhan sekarang ini, tetapi juga perlu melakukan semangat transformasi untuk masyarakat out group, antisipasi untuk generasi yang akan datang, dan pada sistem dimana komunitas meneguhkan eksistensi. Keenam, adanya keberanian, baik sebagai anggota personal komunitas maupun komunitas secara keseluruhan membutuhkan sikap ini untuk menghadapi tantangan dan perubahan untuk menjaga keberlangsungan eksistensinya.¹⁶

3.3 Profile Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa

Paguyuban Budaya Bangsa (PBB) adalah salah satu kelompok Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berpusat di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Warga Penghayat Kepercayaan PBB selain warga Kebumen juga ada yang berasal dari Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purworejo, bahkan dari Luar Jawa. Kantor pusat yang menjadi sekretariat PBB berlokasi di Jalan Sumatra No.9 RT.02/RW09 Kelurahan Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Kepercayaan PBB sejatinya berdiri sejak tahun 1917 dengan nama awal Kawruh Naluri (KWN) yang dipimpin Ki Bagus Hadi Kusumo. Ki Bagus Hadi Kusumo selain menyebarkan ajaran KWN juga mengorganisir gerakan untuk menentang kebijakan pemerintahan kolonial Belanda di wilayah Gombong dan sekitarnya. Pada tahun 1920-an Belanda menuntut pajak per kepala (bukan hanya pajak atau upeti hasil bumi) kepada penduduk pribumi.

Ki Bagus Hadi Kusumo menentang dan melawan dengan menolak pembayaran pajak bahkan dengan berani mengatakan, "*Ini bumi kami. Mestinya kamilah yang menarik pajak pada kalian yang pendatang*". Ki Bagus tidak melibatkan pengikutnya secara kekuatan fisik untuk melawan Belanda namun ia melakukannya secara individual. Ki Bagus Hadi Kusumo kerap melakukan berbagai tindakan salah satunya dengan rutin mengirimkan surat kepada pemerintah kolonial sebagai propaganda penolakan kebijakan pajak per kepala. Akibatnya, Ki Bagus menjadi buruan Belanda dan kerap keluar masuk penjara.

Setelah Ki Bagus wafat, Kawruh Naluri diteruskan oleh putranya yang bernama Nurhadi. Sepeninggal Ki Nurhadi, kepengurusan dilanjutkan oleh anaknya Adji Tjaroko. Pada masa kepemimpinan Nurhadi tahun 1959 berhasil membangun Sanggar Meditasi (tempat ibadah).

¹⁵ B. Heidi Ellis and Saida Abdi, 'Building Community Resilience to Violent Extremism through Genuine Partnerships.', *American Psychologist*, 72.3 (2017), pp. 289-300, doi:10.1037/amp0000065.

¹⁶ Ellis and Abdi.

Pada perkembangannya, tahun 2008 Kepercayaan PBB memiliki badan hukum (inventaris di Dep Kebudayaan dan Pariwisata No. TI. 301/F.8/N.I.I/2008) dengan nama Yayasan Setyaki yang merupakan kepanjangan dari “Setia Marang Kaki-Setia Pada Leluhur.”

Eksistensi Kawruh Naluri yang kemudian berganti nama PBB mengalami pasang surut seiring dengan kebijakan dan pergolakan politik di Indonesia. Pada tahun 1965 sempat mengalami kekavuman. “Seluruh anggota paguyuban dipaksa masuk agama tertentu baik dengan cara halus dan keras. Kebanyakan menyerah dan berpindah agama sehingga anggota menjadi menurun,” Adji Tjaroko.¹⁷

Gambar 1 dan 2

Sanggar Wonomarto: Tempat Sembah Hyang Penganut Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa di Kec. Gombong, Kab. Kebumen



Sumber: Dokumentasi Peneliti

Paguyuban Budaya Bangsa memiliki tiga ajaran dasar yaitu “wet kodrat hukum adat”, “urip iku langgeng”, dan “Manunggaling kawulo Gusti”. Ajaran wet kodrat hukum adat pada dasarnya dunia diciptakan sekali jadi beserta semua isinya termasuk manusianya. Setiap entitas suku dan bangsa memiliki kodratnya masing-masing. Selain itu setiap suku dan bangsa memiliki hukum adatnya masing-masing termasuk budaya spiritualnya. Paguyuban Budaya Bangsa percaya bahwa di mana pun manusia berada dan berkembang di sekitarnya adalah kodrat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Ajaran “urip iku langgeng” artinya manusia terdiri dari beberapa unsur yaitu raga, hidup/urip, sukma, dan nama. Raga adalah bentuk fisik dari manusia atau bisa disebut dengan jasad. Hidup adalah sesuatu yang abadi (zat dari Tuhan). Sukma adalah nafsu yang menggerakkan cipta, rasa, dan karsa. Ajaran dasar Manunggaling kawulo Gusti merupakan ajaran kelompok Kepercayaan pada umumnya. Ajaran ketiga menekankan pada kebaikan setiap langkah manusia yang dekat dengan Tuhan. Berbuat baik menjadi kebutuhannya dan akan setiap perilakunya selalu menjaga

¹⁷ “TATA RITUAL PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA (PBB) PUSAT KEBUMEN”, *Bangkitnya Agama Adat Nusantara*, 2017 <<https://bangkitnyaagamaadatnusantara.wordpress.com/2017/02/02/tata-ritual-paguyuban-budaya-bangsa-pbb-pusat-kebumen/>> [accessed 8 August 2024].

semua yang diciptakan Tuhan termasuk menghargai dan menghormati kodrat dari Sang Pencipta.¹⁸

3.4 Regulasi Diskriminatif dan Represi Sosial

Sesepuh Penghayat Kepercayaan PBB Desa Tanjunganom RT04/RW02, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, Atmo Wiharjo, menguatkan tesis Mulder bahwa Penganut Kepercayaan mengalami rontok besar-besaran dimulai tragedi G30S/PKI 1965. Atmo mengatakan, selama menjadi warga Penghayat Kepercayaan PBB rintangan yang dihadapi dari masa ke masa selalu ada.

Atmo selalu berusaha menguatkan mental keluarganya supaya tangguh dan terbiasa menghadapi tekanan sosial. Utamanya ketika menghadapi tekanan dari tetangga sekitar dan pemerintah. Masyarakat sekitar kala itu hanya mengenal agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha, tanpa mengetahui kelompok Penghayat Kepercayaan.

“Kepercayaan saya, kami menyebutnya dengan KWN (Kawruh Naluri). Sekarang namanya PBB. Warga KWN dianggap organisasi yang tidak benar atau dianggap sebagai orang yang bertaut dengan Gerakan 30S/PKI. Saya pernah menjadi buron oleh sekitar 250 orang. Kalau ketemu waktu itu bisa dipastikan saya mati. Kira-kiranya sudah hampir 25 tahun, ya kisaran tahun 1998. Saya dioyak (dikejar) warga ke hutan. Saya maunya berunding, tapi orang-orang tidak mau. Mereka tetap menuduh (ada keterkaitan dengan PKI).

Atmo menambahkan, di Desa Tanjunganom saat ini Penganut Kepercayaan PBB tersisa 14 Kepala Keluarga (KK). Dahulu saat orang tuanya menjadi sesepuh Kepercayaan PBB di Tanjunganom, masih ada sebanyak 60 KK. Atmo merupakan generasi kedua yang menganut Kepercayaan PBB. Ia menegaskan habisnya generasi kepercayaan karena keluar memeluk agama saat meletusnya G30/S PKI.

Saat ia kecil kerap mendengar cerita dari orang tuanya tentang tekanan dari pemerintah kepada warga penganut Kepercayaan PBB. Atmo tidak menampik jika pada waktu itu mungkin ada warga PBB yang memilih partai PKI saat pemilu. Namun tidak tepat jika PBB secara organisasi diidentikan dengan gerakan Partai Komunis. Berhubung kondisi tidak menentu, KWN (PBB) membubarkan diri (bukan dibubarkan pemerintah) untuk keselamatan warganya.

“Dulu saya tidak bisa melangsungkan pernikahan di kantor catatan sipil. Saya nikah di KUA, karena dulunya saya termasuk yang masuk ke Islam, di KTP-ny. Tapi selama menjadi Islam, saya juga nggak pernah sholat, apalagi masuk masjid. Saya ke sekitaran masjid saja kalau sedang ada kerja bakti. Pada waktu itu belum ada aturan tata cara pencatatan perkawinan Penganut Kepercayaan. Banyak warga KWN (PBB) yang di KTP nya kolom agamanya kosong, maka pernikahannya tidak dicatatkan, tapi hanya menikah secara adat. Paling banyak (pindah) ke (agama) Budha dan pindah ke Islam juga ada”.

Ekses stigma sosial membuat warga PBB mengalami hambatan dalam mencari pekerjaan. Ditambah dengan identitas agama di KTP masih kosong (-) membuat mereka semakin terkendala ketika mendaftar di pemerintahan (ASN, TNI, Polri) juga di sektor perusahaan swasta. Warga Penghayat Kepercayaan PBB berusaha mempertahankan dan mengajarkan ajaran leluhur. Namun generasi muda Penghayat Kepercayaan PBB masih banyak yang mengalami traumatik represi dan diskriminasi yang dialami selama pemerintahan oder baru terulang kembali.

¹⁸ 'IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA', *Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia*, Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan (2022) <<https://>>.

Sesepuh Kepercayaan PBB Desa Kaliwungu, Mandiraja, Banjarnegara, Gunarso, menguatkan cerita diskriminasi dan represi sosial. Adik perempuan Gunarso yang seorang Penghayat Kepercayaan PBB ditolak saat mendaftar sekolah di SMPN 1 Banjarnegara. Demi bisa masuk sekolah di SMP Negeri adik Gunarso harus mengganti identitas agama di KTP dan KK dengan agama Islam. Gunarso harus mencari bantuan “orang dalam” di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Banjarnegara supaya dapat merubah identitas agama di KTP dan KTP secara singkat untuk keperluan mendaftar sekolah.

Gunarso sendiri pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan saat bersekolah. Ia kerap mendapat perkataan-perkataan dari gurunya seperti ‘bagi yang bukan agamanya Islam, dipersilakan keluar’. Akhirnya ia keluar dan orang tua Gunarso berusaha berdialog dengan pihak sekolah. Hingga kelas 2 SMP Gunarso mengikuti pelajaran agama Islam. Ketika lulus SMP dan masuk SMA, kemudian ia ganti mengikuti pelajaran agama Kristen dengan alasan tidak ada pelajaran baca dan menulis bahasa arab.

“Bahkan bukan hanya di sekolah, kami untuk mencari suami atau istri saja waktu itu sangat susah. Walaupun sudah suka sama suka, kalau dari keluarganya nggak mesti merestui, ya akhirnya sama saja tidak jadi menikah. Tapi kalau yang kuat dan sudah suka-sama suka, ya ada yang tetap nikah. Dia (istri) saya juga senang-senang saja. Tapi karena dalam ajaran kami, di PBB, selalu diajarkan kepada anak dan orang tua untuk tetap teguh memegang ajaran leluhur akhirnya bertahan hingga sekarang

Meski pada tahun 1973 kata Kepercayaan masuk dalam rumusaan TAP MPR, namun pada level pergolakan akar rumput masih memanas. Aspek-aspek kemerdekaan dalam beribadah, pendidikan, dan penerimaan sosial di beberapa daerah masih mengalami kesulitan. Rumah ibadah yang merupakan kebutuhan pokok setiap umat keagamaan atau keyakinan menjadi barang yang sulit diwujudkan. Secara otomatis dalam melakukan ibadah secara “berjamaah” warga Kepercayaan PBB mengalami hambatan.

Gunarso masih ingat betul kata-kata yang kerap disampaikan warga sekitar pada keluarganya saat ada pembangunan sanggar untuk beribadah warga Kepercayaan. Warga beragama yang tidak menerima dengan adanya pembangunan sanggar berupaya terus memprovokasi warga lainnya. Warga Penghayat Kepercayaan PBB di Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara membangun sanggar tahun 1998 hingga 1990-an.

“Intinya karena ada penolakan dari sebagian kelompok yang tidak menginginkan berdirinya sanggar. Itu terutama di Desa Somawangi dan Kaliwungu (Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara). Namun, akhirnya tetap berdiri karena istilahnya kami nekat. Saya masih ingat misalnya ada yang mengatakan musyrik, syirik, kafir dan lain-lain. Itu dulu awal-awal, ya sekitar tahun 1990 an. Kalau sekarang sudah mendingan, hampir menerima. Ya, tetap saja ada satu dua yang masih menolak, tapi itu wajar. Akhirnya kami pelan-pelan dapat menggunakan sanggar dengan lebih leluasa”.

Pengalaman pahit anak-anak warga Kepercayaan PBB di sekolah menjadi pertaruhan orang tua dalam mempertahankan keyakinan. Sesepuh warga PBB Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Waluyo, mengatakan kerap beradu argumen dengan anaknya soal ibadah pasca pulang sekolah. Waluyo sempat kaget dengan anaknya yang pernah mengajaknya untuk ibadah sesuai dengan ajaran yang didapat dari pelajaran agama yang diajarkan gurunya di sekolah.

Waluyo dan istrinya merasa pada masa serba sulit. Meneguhkan keyakinan dan mengajarkan Kepercayaan PBB kepada anak yang pada saat bersamaan mendapatkan pelajaran agama di sekolah adalah tantangan terberat yang pernah dia alami. Waluyo kemudian menegaskan

pemahaman kepada anaknya bahwa soal keyakinan keagamaan atau Kepercayaan harus mengikuti orang tua. Bukan mengikuti pelajaran yang didapat dari sekolah. Ia menekankan itu supaya anak-anaknya tidak larut dalam keyakinan agama yang diajarkan di sekolah.

“Anak-anak saya yang sekolah di sekolah negeri, ya (untuk pelajaran agama Islam di sekolah) ada yang koordinir. Akhirnya anak-anak lambat laun mengikuti pelajaran agama. Pernah anak saya memaksa kepada saya untuk melakukan ajaran seperti yang sama diajarkan di sekolah (untuk solat). Terus saya bilang ‘urusan sembahyang, bukan anak yang ngajari orangtua, tapi sebaliknya. Kalau kamu dapat pelajaran (agama) dari sekolah itu untuk ilmu saja, tapi untuk keyakinan itu hak bagi setiap orang, dan orang tua ikut menentukan.

Diskriminasi terhadap anak-anak Penghayat Kepercayaan menjadikan seorang ibu penghayat cukup berat mendidik anak. Ibu penghayat harus telaten menguatkan psikologis anak supaya tetap semangat bersekolah. Seorang ibu Penghayat Kepercayaan PBB Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Ratini, menceritakan anaknya yang mendapatkan pengalaman tidak mengenakan di sekolah. Sekitar tahun 2013 anaknya mengalami diskriminasi dari guru dan teman-temannya.

Setiap pulang sekolah dan bercerita keluh kesah selalu ada beban untuk menguatkan mental anak supaya tetap semangat bersekolah. Sebelum ada Permendikbud No. 27 tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Bagi Siswa Penghayat Kepercayaan, anak-anaknya kerap mendapat bullying di sekolah. Cemoohan itu kerap didapatkan dari sesama siswa dan tak jarang juga dilakukan oleh gurunya.

“Terus gurunya tahu kalau anak saya penghayat karena nggak suka, gurunya bilang ‘itu kan anak Penghayat, dilarang sekolah sama pemerintah.’ Karena anak saya masih kelas empat SD tidak berani melawan. Sampai rumah dia nangis merangkul saya. Ditanyain nggak mau jawab. Saya juga ikutan nangis akhirnya. Itu yang sering dialami anak saya ketika SD. Sama teman juga mereka dibully, kata mereka ‘itu orang tuanya musyrik, nggak punya agama.’ Kalau sama temannya masih berani melawan tapi kan kalau sama gurunya anak saya cuma bisa nangis.

Tahun 2016 kemudian terbit Permendikbud No 27 Tahun 2016 yang membuat Ratini sedikit lega. Begitu mendapat salinan Permendikbud, Ratini dan suaminya memberanikan diri datang ke sekolah. Dengan perasaan was-was kedua orang tua itu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah. Ratini mengantarkan anaknya yang bersekolah di bangku SMP dan suaminya mengantar anaknya yang duduk di bangku SMA. Dia kemudian menjelaskan kepada gurunya bahwa sudah ada aturan tentang fasilitas mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Mahesa Esa.

Beruntung, gurunya menyambut dengan baik. Saat itu satu anaknya sudah ada yang mengenakan kerudung yang kemudian menjadikan anaknya ragu-ragu dan bimbang. Kebimbangan itu dapat dipahami karena anaknya harus melepas hijab saat “kembali menjadi seorang Penghayat Kepercayaan.”

Penerimaan sosial di lingkungan pendidikan terhadap warga Penghayat Kepercayaan PBB mengalami perubahan pasca rezim order baru selesai. Rintangan pasti ada namun tidak sebanyak pada pemerintahan Soeharto. “Supaya warga PBB tetap bertahan memang yang utama dari pendidikan. Itu satu strategi ya pendidikan formal di sekolah, dan informal dari budi pekerti keluarga. Sekolah itu sangat penting karena itu meski banyak rintangan harus dihadapi. Strategi kedua ya di internal keluarga, pendidikan budi pekertinya harus dikuatkan supaya anak-anak tidak meninggalkan ajaran Kepercayaan (Ratini).

Setelah terbit Permendikbud No 27 Tahun 2016 tentang Layanan pendidikan bagi siswa Penghayat Kepercayaan kasus penolakan daftar sekolah atau pemaksaan siswa Penghayat untuk

mengikuti pelajaran agama tidak terjadi lagi. Meskipun demikian, riak-riak kecil diskriminasi masih terus ada dalam ruang-ruang belajar mengajar. Siswa penghayat belum betul-betul bebas leluasa mendapat fasilitas pendidikan kepercayaan di sekolah.

Penyuluh (guru) mata pelajaran Kepercayaan di Kabupaten Banjarnegara, Karsun, mengakui hingga kini masih ada kasus-kasus kecil di ruang kelas yang menimpa siswa Penghayat Kepercayaan. Saat ini di Kabupaten Banjarnegara total ada tujuh siswa Penghayat Kepercayaan di semua tingkatan. Siswa Penghayat Kepercayaan di bangku SD ada tiga anak, siswa SMP ada satu anak, siswa SMAN ada satu anak dan di SMKN ada satu anak. Jumlah 7 siswa itu hanya dari Kepercayaan PBB. Jumlah penyuluh di Kabupaten Banjarnegara ada dua guru dan selalu sigap dalam melayani ketika ada keluhan-keluhan dari siswa.

“Pernah waktu saya masih SD, saya kan mau ulangan Mapel (mata pelajaran) agama (Kepercayaan), terus nggak dikasih soal sama gurunya. Padahal sudah ada pelajaran (kepercayaan) di sekolah itu dan gurunya juga ada. Alasan gurunya, katanya soalnya belum dikasih sama penyuluhnya, padahal penyuluh sudah ngasih. Akhirnya saya pulang nangis, dan minta bantuan ke penyuluh untuk membantu saya. Pernah juga dibulli sama sesama siswa. Kayak mereka mengatakan, kafir begitu. Itu kelas waktu 6 SD”.

Kader-kader muda di internal Kepercayaan PBB saat ini mulai sadar pentingnya pendidikan. Generasi muda merupakan ujung tombak untuk melanjutkan dan melestarikan ajaran leluhur. Pemuda Penghayat Kepercayaan harus mempunyai suatu keinginan untuk terus melestarikan budaya dan istiadat asli Nusantara supaya tidak hilang ditelan zaman.

Novi Istiyaningsih penyuluh Pelajaran Kepercayaan di sekolah negeri mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan jalan dalam mengimplementasikan Mata Pelajaran Kepercayaan. Meskipun masih ada kendala namun tidak menjadi halangan untuk tetap berjuang dan bersinergi dengan berbagai pihak untuk mendapat dukungan moral.

Seiring dapat dilaksanakannya Pendidikan Kepercayaan di sekolah penguatan spiritual melalui masing-masing paguyuban penting untuk terus dilakukan. Penguatan spiritual untuk menanamkan ajaran dan memperkuat keyakinan adalah salah satu upaya yang dilakukan untuk berjalannya regenerasi di kalangan Penghayat Kepercayaan. Mereka sadar bahwa tanpa ketelatenan untuk mengajarkan nilai-nilai kepada generasi muda maka tidak akan terjadi sebuah keberlanjutan

Presidium MLKI Kabupaten Banjarnegara Siswo Diwarjoyo mengakui butuh waktu, tenaga, dan curahan pikiran untuk nguri-uri ajaran leluhur. Ketelatenan dari orang tua dan keuletan dari generasi muda sangat penting untuk melestarikan ajaran nenek moyang yang ditiptkan dengan falsafah kukuh atau kidungan. Sementara untuk zaman sekarang mulai jarang generasi muda yang tekun mempelajari ajaran Penghayat Kepercayaan. Tugas orang tua, pemuka penghayat, dan MLKI kedepan terus meningkatkan kapasitas guru yang kompeten supaya mampu mengajarkan ajaran Kepenghayatan. Generasi muda harus berani belajar dari nol sehingga regenerasi akan muncul dan anak didik terus bertambah.

Saat ini kepengurusan organisasi Kepercayaan PBB dipegang generasi keempat dengan ketua Umum Hadi Bayu Adji. Bayu sapaan akrabnya merupakan cicit dari Ki Bagus Hadi Kusumo sebagai pendiri cikal bakal PBB yang awalnya bernama Kawruh Naluri. Bayu masih sangat muda dan produktif sehingga mampu menggerakkan kembali organisasi yang lama non aktif. Ia bersama sesepuh dan pemuka penghayat berupaya menjalin komunikasi, kolaborasi, dan memperkuat jejaring baik dengan lintas organisasi penghayat, jejaring masyarakat sipil dan pemerintah.

“Kami berjejaring, bersinergi, dan berkolaborasi dengan MLKI, Puan Hayati, atau dengan instansi terkait, misal Kesbangpol atau Dukcapil. Jika dikerucutkan lagi, individual dalam kelompok, secara aktif dengan NGO yang bergerak di bidang yang sama. Salah satu anggota PBB juga terlibat dalam membidani lahirnya Gema Pakti dan termasuk tim perumus. Beliau Roki Irawan (almarhum), aktif juga dalam menyusun dan merumuskan materi untuk buku ajar anak didik.

Gambar 3 dan 4

Kanor Sekretariat Pusat Organisasi Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa di Kec. Gombang, Kab. Wonosobo dan Warga Penghayat Kepercayaan Paguyuban Budaya Bangsa menikmati sajian pasca kegiatan rutin



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Ceprudin

3.5 “Mangro” dan Strategi Resiliensi Penghayat Paguyuban Budaya Bangsa

Represi sosial dan diskriminasi layanan publik yang dialami kelompok Penghayat Kepercayaan PBB memaksa para anggotanya berkeyakinan ganda (Mangro). Selama mengalami represi sosial dan kesulitan mendapatkan layanan dari pemerintah warga Kepercayaan PBB mayoritas menjalani keyakinan ganda “mangro” supaya tetap dapat mempertahankan ajaran leluhurnya. Pada masa-masa sulit itu warga PBB banyak yang secara identitas kependudukan menganut salah satu “agama negara” namun secara keagamaan mereka tetap melakukan “ritual ibadah” secara Kepercayaan.

Kepercayaan PBB sejatinya berdiri sejak tahun 1917 dengan nama awal Kawruh Naluri (KWN) yang dipimpin Ki Bagus Hadi Kusumo. Sejak awal berdiri hingga tahun 1965 KWN tetap eksis bahkan pengikutnya semakin bertambah dan menyebar hingga luar Pulau Jawa. Meskipun kepemimpinan berganti-ganti dari Ki Bagus Hadi Kusumo, Ki Nurhadi, hingga Adji Tjaroko KWN tetap eksis sebelum badai sosial politik 1965 menerpa. KWN mulai gonjang ganjing hingga terpaksa sempat vakum (non aktif) karena menghadapi tekanan sosial politik begitu hebat sejak tragedi berdarah G 30/S PKI.

Kevakuman organisasi KWN membuat para penganutnya rontok besar-besaran dan sebagian besar memilih menganut salah satu agama negara. Selama mengalami kesulitan itu berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui mayoritas warga KWN pindah ke Agama Budha dan ada pula yang memeluk agama Islam. Meskipun secara identitas agama pada administrasi kependudukan

memeluk “agama negara” namun secara “ritual ibadah” mereka masih tetap menjalani sebagai seorang KWN.

Menjalani keyakinan ganda (mangro) ini setidaknya dilakukan warga KWN sejak tahun 1965 hingga akhir tahun 2007. Warga KWN perlahan mulai lepas dari tekanan sosial sejak terbit PP No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk. Pada peraturan tersebut diatur tentang tata cara pencatatan perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan yang membuat warga KWN berbondong-bondong mencatatkan perkawinannya yang semula tidak dapat di catatkan di catatan sipil karena belum ada aturan yang mengaturnya.

Pada tahun 2008 KWN berubah nama menjadi PBB sebagai tanda lahir kembali gerakan Kepercayaan yang berpusat di Gombang, Kebumen ini. Sejak tahun 2008 hingga sekarang warga KWN kemudian melakukan aktivitas keagamaan kembali hingga anggotanya saat ini terdata sekitar 1000 orang lebih. Warga KWN yang sejak 1965 menganut salah satu agama, perlahan kembali ke “pangkuan organisasi Kepercayaan PBB” yang sudah legal di bawah naungan Yayasan Setyaki.

Resiliens adalah kemampuan bertahan suatu kelompok atau individu dari gangguan yang dialaminya. Suksesnya kemampuan bertahan diukur dengan besarnya gangguan yang dialami. Pada bagian ini akan digambarkan cara bertahan kelompok Penghayat Kepercayaan PBB dari gangguan represi dan diskriminasi yang dihadapi dan mampu bertahan hingga pulih kembali.

Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan secara komunitas (community resilience) dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki guna merespon, bertahan, dan pulih dari situasi yang merugikan hak-hak dasarnya sebagai warga negara. Kelompok Kepercayaan yang berpusat di Kebumen, Jawa Tengah ini mampu bertahan dengan modal utama yaitu berkomunikasi dengan masyarakat, adanya ajaran yang sistematis, mampu beradaptasi, bertransformasi, adanya keberanian hingga mampu mempertahankan regenerasi keberlanjutan.

Anggota Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan dalam situasi yang serba sulit sehingga mampu menentukan masa depan organisasi. Pola pikir sistematis yang diajarkan pendiri Kepercayaan PBB Ki Bagus Hadi Kudumo menjadi landasan penting untuk menghadapi masalah yang kompleks seperti problem perkawinan, pendidikan, pendirian rumah ibadah dan label sesat, musyrik, PKI. Warga Kepercayaan PBB mampu beradaptasi dengan memaksimalkan kekuatan komunal untuk merespon gejala perubahan sosial, politik, budaya, maupun respon keagamaan yang dinamis berkelanjutan.

Salah satu cara bertahan kelompok Kepercayaan PBB dengan melakukan transformasi (transformation) nama dan bentuk legalitas organisasi. Kepercayaan yang berpusat di Gombang, Kebumen ini berubah nama dari semula Kawruh Naluri (KWN) menjadi PBB. KWN sempat membekukan diri pasca tragedi politik 1965. Pada tahun 2008 di bawah Kepemimpinan Adji Tjaroko berubah nama menjadi PBB dan tercatat di Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni, dan Film Departemen Pariwisata dan Kebudayaan dengan Tanda Inventarisasi nomor IT.301/F.8/N.1.1/2008.

Ketua Umum Kepercayaan PBB Hadi Bayu Adji sadar betul bahwa untuk keberlanjutan (sustainability) organisasi modern tidak cukup hanya berkuat pada urusan internal organisasi. Eksistensi sebuah kelompok Penghayat Kepercayaan saat ini akan berkembang jika terus melakukan komunikasi dan adaptasi dengan berbagai elemen di masyarakat. “Kami berjejaring, bersinergi, dan berkolaborasi dengan MLKI, Puan Hayati, dan dengan instansi pemerintah terkait. Misal Kesbangpol atau Dukcapil. Kami aktif berjejaring dengan NGO yang bergerak di bidang yang sama. Roki Irawan (anggota PBB) aktif dalam penyusunan materi untuk buku ajar anak Pelajaran Kepercayaan,” kata Hadi Bayu Adji.

Cara bertahan dari suatu gangguan yang tidak kalah pentingnya adalah keberanian. Keberanian sangat dibutuhkan baik sebagai individu maupun komunitas secara keseluruhan untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Keberanian warga Penghayat Kepercayaan PBB untuk bertahan dengan ajaran leluhur dan tidak masuk ke salah satu agama terbukti mampu menjaga keberlangsungan eksistensi organisasi. Meskipun harus berganti nama warga Penghayat Kepercayaan PBB dari generasi ke generasi tetap setia menjalankan ritual sebagai seorang Penghayat Kepercayaan.

Pasca kemelut diskriminasi rezim order baru selesai warga Penghayat Kepercayaan PBB mulai tumbuh kemandirian. Dengan semangat kemandirian itu mereka bergerak untuk kepentingan bersama yang lebih luas. Kemandirian itu dibuktikan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan secara pembiayaan murni hasil swadaya para anggotanya. Bukan sebatas kegiatan, bahkan pembangunan sanggar pusat meditasi sebagai tempat ibadah di Gombang Kebumen dibangun secara swadaya.

“Kala itu kami membantu semampunya. Yang mampunya bawa beras, kami bawa beras. Yang mampunya bawa sayur, kami bawa sayur. Yang mampunya hanya tenaga, kami berangkat dengan sumbangan tenaga. Semua gotong royong. Bukan hanya pembangunan sanggar pusat, kami membangun sanggar (balai pertemuan) ini (Sanggar di Desa Somawangi, Mandiraja, Banjarnegara) juga dibangun secara sukarela. Tanahnya ya tanah milik kami sendiri. Bukan milik pemerintah (Siswo Diwarjoyo).

Sejak 2008 lalu warga Penghayat Kepercayaan PBB rutin menggelar pertemuan setiap 35 hari sekali. Pada setiap pertemuan mereka membahas perihal kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi para anggotanya. Saat peneliti melakukan observasi di balai pertemuan atau sanggar pusat Gomong, Kebumen, berbarengan dengan pertemuan rutin 35 harian. Salah satu agenda pertemuan itu adalah membahas ajaran dan doa sehari-hari yang akan diajarkan kepada anak-anak.

Secara global problem antara warga Kepercayaan PBB, masyarakat sosial, dan pemerintah merupakan isu relasi antara agama dan negara. Problem hubungan antara agama dan negara menjadi diskursus hampir di semua negara yang pada dasarnya ada “pengutamaan” perlakuan (state policy favoritism) terhadap kelompok keagamaan yang anggotanya secara mayoritas menduduki kekuasaan di pemerintahan. Negara-negara yang masih “mengagungkan” atau setidaknya mengakomodir kepentingan-kepentingan elite agamawan akan mengalami problem yang sama seperti yang dialami Kelompok Kepercayaan PBB di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Sebagai solusi kedepan atas problem yang dialami kelompok Kepercayaan PBB dan juga kelompok-kelompok Kepercayaan secara umum di Indonesia pemerintahan dan warga masyarakat harus konsisten berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Prof. Nasaruddin Umar tegas menyatakan bahwa Indonesia bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila di mana semua agama dan pemeluknya diperlakukan sama sebagai warga negara Indonesia.

Sebagai negara hukum Pancasila tidak ada agama atau kepercayaan eksklusif yang harus diperlakukan lebih dominan di antara agama atau kepercayaan lainnya. Pemisahan urusan negara dan agama di Indonesia tidak secara otomatis menjadikan negara sekuler mutlak. Sebaliknya keterlibatan negara dalam urusan agama tidak otomatis menjadikan negara agama dan negara tidak boleh mengasikan kepentingan-kepentingan kelompok keagamaan yang secara kuantitas minoritas.

Indonesia adalah bangsa yang multikultural, multi etnis, ras, agama dan kepercayaan. Bangsa Indonesia tidak dapat memisahkan secara penuh antara urusan negara dan agama. Namun demikian bukan berarti negara beserta segala produk kebijakannya sah mendiskriminasi kelompok Kepercayaan PBB. Nilai-nilai agama (yang rahmatan lil alamin) cukup menjadi spirit dalam bernegara sehingga tujuannya untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan terlaksana dalam sebuah tatanan bernegara. Negara harus mampu menjamin hak-hak dasar semua warga negara termasuk kelompok Penghayat Kepercayaan PBB.

4. KESIMPULAN

Kelompok Penghayat Kepercayaan PBB mampu bertahan dari gangguan hebat berupa diskriminasi dan represi sosial. Mereka mengalami diskriminasi dari pemerintah berupa paksaan untuk memilih salah satu agama, tidak dapat mencatatkan perkawinan, gangguan mendirikan rumah ibadah, dan gangguan saat proses belajar mengajar di sekolah. Warga Penghayat Kepercayaan PBB juga mengalami represi sosial berupa labeling sesat, kafir, masyrik, dan cap PKI.

Demi mempertahankan ajaran leluhur Kepercayaan PBB sempat vakum dan hanya beraktifitas secara perorangan. Kelompok Kepercayaan PBB yang semula bernama Kawruh Naluri (KWN) mampu bertahan hingga sekarang beranggotakan lebih dari 1000 orang. Meskipun banyak kehilangan anggotanya yang memilih agama negara namun kondisi ini lebih baik jika dibandingkan dengan organisasi Kepercayaan lain di Jateng yang saat ini hanya tinggal nama. Kelompok Kepercayaan PBB memaksimalkan segala potensi yang ada untuk menghadapi gangguan sehingga mampu melakukan regenerasi.

Pada bagian penutup ini penting penulis tekankan bahwa Kelompok Penghayat Kepercayaan secara umum dan khususnya Penghayat Kepercayaan PBB mempunyai hak yang sama dengan warga negara lainnya. Mereka dilindungi konstitusi dan pelayanannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasar itu pemerintah harus memenuhi dan melindungi hak-hak dasar Penghayat Kepercayaan PBB. Warga masyarakat Indonesia yang memahami pentingnya menjaga toleransi supaya represi sosial tidak terjadi lagi. Kepada warga Penghayat Kepercayaan PBB supaya lebih berani menunjukkan identitas keyakinan yang sebenarnya di ruang publik supaya sitigma negatif mulai hilang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ainurrohmah, Ira, 'Nilai-Nilai Spiritualitas Dalam Paguyuban Budaya Bangsa : Studi Analisa Terhadap Aliran Kepercayaan Di Kecamatan Langensari' (unpublished diploma, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020) <<https://digilib.uinsgd.ac.id/38126/>> [accessed 8 August 2024]

'ANRI Luncurkan Naskah Sumber Arsip Pemilu 1955' <<https://anri.go.id/en/publications/news/anri-luncurkan-naskah-sumber-arsip-pemilu-1955>> [accessed 8 August 2024]

Ardiansyah, Atih, 'KONSEP DIRI PENGHAYAT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHAESA DI YAYASAN CENDEKIAWAN KAMPUNG INDONESIA', *JRK (Jurnal Riset Komunikasi)*, 13.1 (2022), p. 36, doi:10.31506/jrk.v13i1.15314

Ellis, B. Heidi, and Saida Abdi, 'Building Community Resilience to Violent Extremism through Genuine Partnerships.', *American Psychologist*, 72.3 (2017), pp. 289–300, doi:10.1037/amp0000065

Endraswara, Suwardi, 'AJARAN BUDI PEKERTI LUHUR DALAM SASTRA MISTIK PENGHAYAT KEPERCAYAAN UNTUK MEMBANGUN PENDIDIKAN KARAKTER

BANGSA', *JISABDA: Jurnal Ilmiah Sastra Dan Bahasa Daerah, Serta Pengajarannya*, 1.2 (2019), p. 31, doi:10.26877/jisabda.v1i2.4742

Gunderson, Lance H., Craig Reece Allen, and C. S. Holling, *Foundations of Ecological Resilience* (Island Press, 2012)

Hakiki, Kiki Muhamad, 'ALIRAN KEBATINAN DI INDONESIA', *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 6.2 (2011), pp. 63–76, doi:10.24042/ajsla.v6i2.497

Hannan, Abd, 'Penganut Agama Kepercayaan Dan Problem Kebebasan Berkeyakinan Di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama', *MAWA IZH JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN*, 13.1 (2022), pp. 1–26, doi:10.32923/maw.v13i1.2209

'IMPLEMENTASI AJARAN KEJAWEN OLEH PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA', *Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia*, Vol 22 No 2 (2022): Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama dan Kebudayaan (2022) <https:>

Jufri, Muwaffiq, 'POTENSI PENYETARAAN AGAMA DENGAN ALIRAN KEPERCAYAAN DI INDONESIA', *Jurnal Yudisial*, 13.1 (2020), p. 21, doi:10.29123/jy.v13i1.360

Mulder, Niels, and Alois A. Nugroho, *Kebatinan dan hidup sehari-hari orang Jawa: kelangsungan dan perubahan kultural*, Cet.2 (Gramedia, 1984)

Pimm, Stuart L., 'The Complexity and Stability of Ecosystems', *Nature*, 307.5949 (1984), pp. 321–26, doi:10.1038/307321a0

Sugiyono, Dr, 'Memahami Penelitian Kualitatif', 2010

Sulani, Puji, Priyanto Wibowo, and Tuty Nur Mutia Enoch Muas, 'Sustainability of Cultural Identity of Ex-Adherents Kawula Warga Naluri of 1966-1971 in Banjarnegara, Indonesia', *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 6.2 (2022), pp. 183–94, doi:10.15575/jw.v6i2.15727

'TATA RITUAL PAGUYUBAN BUDAYA BANGSA (PBB) PUSAT KEBUMEN', *Bangkitnya Agama Adat Nusantara*, 2017 <https://bangkitnyaagamaadatnusantara.wordpress.com/2017/02/02/tata-ritual-paguyuban-budaya-bangsa-pbb-pusat-kebumen/> [accessed 8 August 2024]

Viri, Kristina, and Zarida Febriany, 'Dinamika Pengakuan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia', *Indonesian Journal of Religion and Society*, 2.2 (2020), pp. 97–112, doi:10.36256/ijrs.v2i2.119